

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Fuady, Munir.(2018). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, R. (2022). Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia: Kajian teoritis dan kasus. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suci, A. (2024). Hukum PKPU: Penundaan kewajiban pembayaran utang. Laksbang Akademika
- Serlika, A. (2021). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Kencana.
- Rahayu, H. (2020). Hukum Kepailitan. Malang: Setara Press.
- Ramadhani, F. (2024). Hukum Bisnis dan Perlindungan UMKM di Era Digital. Jakarta: Erlangga Hukum.
- Kurniawan, A., & Susanti, D. (2021). Pengembangan UMKM di Era Digital. Jakarta: Prenada Media.
- Kurniawan, E., & Susanto, A. (2023). Manajemen konflik utang-piutang dalam PKPU. Yogyakarta, Indonesia: ANDI.
- Muhaimin.(2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Prasetyo, H., & Wijaya, R. (2022). Pengantar UMKM: Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Refika Aditama.
- Pratama, D. (2024). Perlindungan hukum UMKM dalam proses restrukturisasi utang. Bandung: CV. Media Hukum.
- Pratama, R. (2023). Aspek hukum penundaan kewajiban pembayaran utang. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

- Ramadhan, D.. (2025). UMKM: Definisi, karakteristik, dan kontribusi ekonomi. Jakarta: Sinar Grafika
- Ramadhani, F. (2024). Hukum Bisnis dan Perlindungan UMKM di Era Digital. Jakarta: Erlangga Hukum
- Sanjaya, U. H. (2021). Penundaan kewajiban pembayaran utang: Konsep dan praktik di Indonesia. UII Press.
- Siregar, A. (2021). Penundaan kewajiban pembayaran utang: Prinsip dan praktik PKPU. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy.(2018). Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Shubhan, M. Hadi. (2021). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Prenada Media.
- Suryana, Y.. (2022). Manajemen UMKM: Teori dan praktik. Refika Aditama.
- Suryanti, Nyulistiowati. (2023). Kepailitan: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kelangsungan
- Tambunan,T. H. (2021). Umkm Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan. Jakarta: Penerbit Prenada Usaha.
- Yuhelson. (2023). Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan.Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Wicaksono, A. (2021). Hukum Bisnis dan Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, A., & Kusuma, D. (2022). Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Prenada Media.
- Yitawati, K. (2022). Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Deepublish.

### Artikel dalam Jurnal:

- A Abigail, Prasetyo.(2023). “Kedudukan Organ RUPS Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan,” *Jurist-Diction*, Vol. 6 No. 3,
- Angeline (2025). *Comparative Analysis of Insolvency Regimes*.
- Angeline, M. (2025). "The Singapore Simplified Insolvency Programme: Lessons for Developing Economies," *Asia-Pacific Law Journal*, Vol. 13, No. 2, hlm. 40-55.
- Anggoro (2025). Kesiapan Hukum Persaingan Usaha Dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mendorong Perkembangan Ekonomi Biru Di Indonesia
- Anggoro, T. (2022). Transformasi Hukum Korporasi dan Inovansi di Era Digital.
- Anisah (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan
- Annisa, L & Khairus, F. L. (2024), “Perlindungan Kreditor dalam Penerapan Asas Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,” *Commerce Law*, Vol. 4 No. 1.
- Ardhya, S. N (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*,8(2).
- Bahasoan, M.(2024). Transformasi Digital pada UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi di Negara Berkembang. *Jurnal JIPM*, Vol. 12
- Cahya, (2025) Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pasca Pembatalan Homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- Dantes, K. F (2021). Dampak Putusann Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta
- Dantes, K. F (2024). Perlindungan Konesumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian.
- Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3 (3).
- Deras, T. M. (2024). Kritik Terhadap Sistem Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana: Studi Kasus Kepailitan Debitur Kecil.
- Fadhilah, N., & Kurniawan, I. (2022). *Simplified Insolvency for MSMEs: A Comparative Study for Indonesian Legal Reform*
- Firdaus, M. I., & Rahayu, S. (2023). Eksistensi Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Pada Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga.
- Gloria, M.(2021) “Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6 No. 1,
- Hadi (2021), Pemenuhan Hak dan Jaminan Pekerja Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagi Karyawan Hotel di Bandung.
- Haichal, F. (2022). Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor yang Gagal Bayar Karena Terdampak *Covid-19*.
- Harahap, N. A & Salsabila (2022). Peran UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi *COVID-19*.
- Hidayat, A. (2023). Kepailitan UMKM dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Ekonomi Nasional. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53 No. 2.

- Hidayat, R. (2022). Perlindungan Hukum Debitur UMKM dalam Penentuan Imbalan Jasa Kurator. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Hidayat, W (2023). Kritik terhadap Ketimpangan Perlakuan Hukum dalam Sistem Kepailitan Indonesia.
- Husna, N dan Wibawa, I “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus,” *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 25 No. 1, 2024.
- Hutapea, A. (2025). Penerapan Asas *Going Concern* dalam Praktik Peradilan Niaga terhadap Entitas Bisnis.
- Indrawati, S & Rachmawati, F. A. (2021), “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM,” *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 1 No. 3.
- Kale, G.I dan Dharmakusuma, A.A.G.A..(2020) “Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Kaswinata, I. (2023). UMKM dan Pembangunan Ekonomi Daerah.
- Kautsar, M A, & Muhammad, R. (2021). Analisis Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Benturan Kepentingan Kreditor dan Debitor..
- Kurniawati, E. (2025). Reformasi Hukum Kepailitan untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan
- Kusuma, D. C (2023) “Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal,” *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 3.

- Lestari, D. (2023). Analisis Implementasi Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Imbalan Jasa Kurator. *Jurnal Hukum Niaga dan Bisnis*.
- Miswar., Marzuki., & Nelvitia. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pandemi *Covid-19*.
- Mufti, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Debitor Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator.
- Mulyadi, A., & Pratama, R. (2023). Efektivitas Prosedur Kepailitan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.
- Nusantara, M. P. A “Kajian Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Perorangan,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5 No. 4, 2025*
- Parapat, H.A dan Djun’astuti, E., “Ambiguitas Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Perorangan: Urgensi Pengaturan Khusus dalam Undang-Undang Kepailitan,” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 11 No. 2, 2025*.
- Prakoso, B. (2024). Keadilan bagi Kreditor Konkuren dalam Proses Likuidasi Aset UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*.
- Pramana, A., & Tedjosaputro, L. (2022). Perlindungan Hukum Debitor dalam Pengelolaan Boedel Pailit bagi Kelangsungan Usaha.
- Prasetyo, R. (2025). Hukum Perlindungan UMKM: Teori dan Praktik pasca-UU Cipta Kerja. Bandung
- Pratama, B. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Debitor UMKM dalam Pusaran Kepailitan
- Putri Salsabila (2024). Ketahanan UMKM dalam Menghadapi Krisis Ekonomi: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan.

- Putri, A. & Sokarina, A. (2024). "*The Meaning of Going Concern Based on the Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*," *International Journal of Business and Applied Economics*, Vol. 3 No. 4.
- Qadisyyah, M. (2023). Strategi Digital Marketing pada UMKM dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi.
- Rahman, F. (2025). "*Harmonisasi Regulasi Kepailitan UMKM di Indonesia terhadap Standar UNCITRAL*," *Jurnal Hukum Internasional dan Komparatif*, Vol. 7, No. 1, hlm.
- Rivaldo. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Mitra Usaha Ketika Terjadi Kepailitan Perusahaan
- Rongiyati, S. "Syarat Pendirian dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 14 No. 1, 2023.
- Sambiri, G., Jayadi, H., & Manalu, Artha, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*On Going Concern*) Dalam Perkara Kepailitan
- Sitorus, R. P., & Setiawan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Susilo & Hapsawati (2025) Analisis Penyelesaian Kewajiban Debitur Terhadap Kreditur Dalam Perkara Kepailitan Individu.
- Tiawarman, A.K. (2022), "Restatement Asas On Going Concern Melalui Pengaturan Debt Threshold sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 5.

Wahyudi, S. (2025). "Karakteristik Yuridis Debitur UMKM dalam Sengketa Kepailitan," *Jurnal Ilmiah Hukum Niaga*, Vol. 15, No. 1, hlm.

Wibowo, A., & Setyawan, B. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi *Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan*

Windari RA (2026). Daya Ikat Perjanjian Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Telaah Yuridis atas Penerapan *Asas Pacta Sunt Servanda*.

Yordinand, dkk. (2024). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Penentuan Kepailitan Terhadap Debitor Solven.

Yunita, Elisabeth., & Permatasari, Pita. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Sampai Dengan Batas Akhir Pendaftaran Tagihan.

#### **Jurnal Elektronik:**

DPR RI. (2025). Penghapusan Piutang Macet UMKM: Implementasi Kebijakan dan Tantangan Fiskal. *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran*.

Infobanknews (2025). Analisis Rasio NPL UMKM Indonesia.

Kadin Indonesia. (2025). Data dan Statistik UMKM Indonesia 2024- 2025. Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Pratama, G. (2025). Kinerja Bank Tertantang Hadapi Tren Kenaikan Kredit Macet UMKM

Suyudi, A. *Perlunya* Pengaturan Kepailitan dan PKPU Khusus untuk UMKM <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-pengaturan-kepailitan-dan-pkpu-khusus-untuk-umkm-lt6672b3f6abd0a?page=all>

UNCITRAL. (2021). *Legislative Guide on Insolvency Law for Micro and Small Enterprises*.

**Skripsi:**

Ferdianza, (2026) Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Mengabulkan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Yang Masih Dalam Proses Likuidasi.

Lubis, T., & Siregar, D. (2024). Perbandingan Hukum Kepailitan: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Naufal Arie Taufik Nurrahman (2023). Implementasi Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana Sebagai Kreditor dalam Permohonan Pailit.

Sari, D. P. (2024). Analisis Perlindungan Debitor UMKM dalam Putusan Pembatalan Perdamaian.

Sultani, Albima, A. (2024). Akibat Hukum Terhadap Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan.

Wiguna (2024) Rekonstruksi Regulasi Insolvensi Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Sosial.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Peundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (*Lembaran Negara Tahun 2004 No 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( *Lembaran Negara Tahun 2008 No 93, Tambahan Lembaran Negara 4886*)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( *Lembaran Negara Tahun 2023 No 41, Tambahan Lembaran Negara No 6856*)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (*Lembaran Negara Tahun 2021 no18, Tambahan Lembaran Negara No 6620*)

